

Editorial

Keberlanjutan dan Kebertahanan Kajian Pesantren di Indonesia

Lembaga pesantren merupakan bagian integral dari kehidupan dan sejarah bangsa Indonesia. Peran historis ini telah lama dimainkan. Bahkan, eksistensi historis kelembagaan pesantren ini jauh lebih kuat dibanding Indonesia sendiri. Secara kuantitas pun, lembaga pesantren ini cukup besar. Merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh pemerintah, terdapat 27.230 pondok pesantren di Indonesia. Populasi pondok pesantren terbesar berturut-turut berada di Provinsi Jawa Barat (28%), Jawa Timur (22,05%), Jawa Tengah (15,70%), dan Banten (12,85%) dengan jumlah 1.886.748 orang santri laki-laki dan 1.872.450 santri perempuan (Kementerian Agama 2014).

Besar dan kuatnya peran sosial-historis pesantren ini, terutama di era '60-an sampai '90-an, bisa dibuktikan dengan kajian terhadap institusi ini yang demikian semarak. Untuk mempermudah, kajian pesantren bisa diklasifikasikan pada beberapa kategori. Pertama, pesantren sebagai entitas pendidikan. Turunan dari kajian ini adalah studi mengenai metode pengajaran, silabus pengajaran, teknik mengajar, dan sejumlah hal yang terkait dengan model peningkatan ilmu formal kepesantrenan (Bruinessen 1994). Kedua, pesantren sebagai entitas budaya. Turunan dari kajian ini menjelaskan pola-pola komunikasi maupun sistem distribusi informasi dalam setiap agen pesantren. Studi yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah ekspresi religiusitas warga pesantren (Horikoshi 1987). Ketiga, pesantren sebagai entitas politik. Turunan dari kajian ini banyak memfokuskan pada hubungan kelembagaan pesantren dalam isu-isu kontemporer dan negara (Wahid 2009).

Geertz (1960) bisa dikatakan ilmuwan pertama yang meneliti pesantren dan membangun satu kategori penting dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks kelompok sosial, Geertz memberikan label kelompok santri berdampingan dengan kelompok abangan dan kelompok priayi (Geertz 1981). Sementara itu, ilmuwan Jepang, Horikoshi (1987) mengeluarkan satu istilah terkenal mengenai agen

dalam institusi pesantren, yakni kiai. Kiai dikatakan sebagai *cultural broker* karena menyangkut kekuasaan yang dimilikinya bisa menjadi “penyaring” berbagai masukan kepada lembaga pesantren (Horikoshi 1987). Studi Abdurahman Wahid atau Gus Dur (2001) juga menarik ketika ia menyimpulkan bahwa entitas pesantren adalah subkultur dari sebuah kultur besar di luarnya. Kompleksitas dan keragaman ekspresi di dalam institusi pesantren menjadikannya demikian independen dari lembaga luar. Bruinessen (1995) menjelaskan bagaimana relasi-relasi yang terjadi dalam sebuah institusi pesantren yang terrefleksi dalam tindakan keagamaan para pelajarnya. Ilmuwan Belanda lainnya, Steenbrink (1991), meneliti masalah kelembagaan pesantren dari aspek yang lebih historis. Dalam temuannya, ia menjelaskan asal usul pesantren sampai kepada dinamika sosial budaya yang melekat pada institusi pesantren tersebut.

Selain di ranah budaya, kajian pesantren yang dikaitkan dengan pergolakan politik juga tidak kalah semarak. Kartodirdjo (1984; 1986) maupun Kurosawa (1993), misalnya, membuktikan peran tokoh-tokoh agama dalam beberapa aktivisme politik. Di ranah lain, studi kontemporer mengenai pesantren sering dihubungkan dengan tampilnya kaum santri di panggung politik. Jati (2014) dalam sebuah artikel yang berjudul “Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdlatul Ulama” menyoroti akan pengakuan partai politik berbasis warga NU dalam khasanah politik Indonesia terkini.

Keragaman kajian pesantren menunjukkan bahwa berbagai strategi pengelolaan sumber daya internal pesantren sudah cukup lama menjadi objek kajian akademik. Kajian yang dilakukan oleh Toriquddin (2011:24-35) menyoroti tindakan kreatif salah satu pesantren di Jawa Tengah yang mengoptimalkan dana zakat sebagai bagian dari praktik ekonomi syariat. Lalu studi yang dilakukan oleh Fauroni (tanpa tahun) mengaitkan konsep *ukhuwah* ‘persaudaraan’ dengan nilai-nilai ekonomi yang hadir dalam lingkungan dan sistem pesantren. Kemudian kajian Sanusi menjelaskan adanya upaya pengembangan sikap dan perilaku kemandirian dalam sistem pendidikan pesantren (Sanusi 2012). Bahkan, dalam pengamatan Rimbawan (2014), pesantren juga dianggap sebagai agen pemberdayaan masyarakat.

Ketika Wahid (2001) mengatakan bahwa pesantren adalah sebuah subkultur, realitas sosio-antropologis pesantren demikian lengkap.

Dalam pesantren hadir beragam hal yang biasa ada di masyarakat: nilai-nilai, jaringan kerja, agen-struktur, dan sistem sosial. Pun ketika sosok kiai menjadi representasi penting sebagai agen budaya (*cultural broker*) karena dianggap menjadi penyaring berbagai hal yang terkait dengan pesantren (Horikoshi 1987).

Dalam kultur yang lebih besar, institusi pesantren merupakan bagian tidak terpisahkan dari tradisi bangsa Indonesia. Kelembagaannya bisa ditelusuri ketika Islam mulai masuk ke dalam sistem Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 atau ke-15 dan pada saat yang sama para penyebar Islam yang antara lain dipelopori oleh para wali membangun sebuah komunitas warga muslim (Muljana 2009). Bahkan, faktor ini pula yang disimpulkan oleh Geertz (1981) bahwa pesantren berkaitan dengan tiga kategori tradisi besar: abangan, santri, dan priayi.

Selain ketiga model arus besar kajian pesantren seperti dikemukakan di atas, ternyata masih ada ruang yang cukup menarik untuk didalami secara akademik dan selama ini masih belum tergarap, yaitu kajian pesantren sebagai institusi yang memiliki sistem. Kajian ini cenderung belum semarak—jika tidak bisa dikatakan belum ada, apalagi menyangkut sistem produksi dan optimalisasi modal institusional yang dimiliki pesantren maupun pola-pola pengusahaan dan inovasi sumber daya pesantren oleh lembaga pesantren sendiri sejauh ini belum ditemukan.

Mengapa ruang tersebut kurang diminati oleh para peneliti saat ini? Padahal pentingnya kajian sistem kelembagaan pesantren didasari pada beberapa argumentasi berikut: (1) secara kultural, pesantren telah hadir melalui rentang waktu yang panjang. Namun, dalam setiap proses kelembagaan yang ada, pesantren selalu memiliki fase transisi rutin, yakni ketika tokoh karismanya meninggal ada pesantren yang kemudian tetap eksis dan ada yang kemudian meredup; (2) pesantren yang mengandalkan aspek karisma Weberian, atau keterampilan nonteknis ini, mengalami dinamika yang sangat tergantung pada sosok pemimpin karismatik. Akan tetapi, beberapa pesantren tetap mampu melalui masa transisi ini dengan baik karena proses kaderisasi yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya. Namun, tetap saja dalam upaya mempertahankan keberlangsungan lembaganya, terlebih jika secara organisasi sudah semakin besar, institusi pesantren kemudian membangun sistem. Hanya saja, sistem ini sepertinya sangat tertutup dan dijalankan manajemen tertentu sehingga keberlanjutan sistem tersebut belum ada penjelasannya secara akademik. Dalam konteks mempertahankan sistem sosial, kita

menemukan bahwa kreativitas, baik dari sosok maupun figur, dalam lembaga atau suatu entitas demikian menentukan keberlanjutan lembaga tersebut (Hermansah 2014). Lembaga yang tidak kreatif bisa dikatakan cenderung mengalami kejumudan (*stuck*) pada titik atau fase tertentu.

Dengan populasi yang sangat besar itu, institusi pesantren bisa menginformasikan bahwa di dalam dan antarpesantren memiliki suatu sistem yang berkontribusi pada perkembangan dan keberlanjutan institusi. Untuk memahami bagaimana sistem itu ada dan bekerja dalam suatu entitas, pendekatan teori sistem menarik untuk digunakan. Sebagai contoh, keberlanjutan sistem sosial dan sistem nilai dalam proses ekonomi menurut Parson (1964) merupakan bentuk rasionalitas ekonomi yang di antaranya tampil dalam maksimalisasi utilitas. Keberlanjutan sistem sosial dan sistem nilai ini menurut Luhmann (1986) terjadi karena setiap aktor berelasi dalam komunitas secara mekanistik. Konsekuensi relasi-relasi yang mekanistik itu kemudian melahirkan *self-creation* atau autopoiesis. Dalam komunitas kecil yang mekanistik itu peran tiap individu/subjek akan tampak besar. Di samping itu, unsur rasionalitas dalam sistem sosial dan sistem nilai ditunjukkan oleh tindakan para aktor tersebut dalam bentuk maksimalisasi utilitas produk ekonomi. Peran individu dalam konteks sosial ditunjukkan oleh Giddens (1984). Di samping itu, dalam konteks teori sosial yang mendiskusikan tentang kreativitas ekonomi, Giddens mengidentifikasi aspek-aspek fundamental konsep/teori inovasi dan kreativitas. Di sinilah para peneliti perlu menggunakan cara pandang baru dalam melihat pesantren.

Cara pandang baru ini yang disebut sebagai perspektif sistem sosial yang kreatif (baca: perspektif kreatif). Secara teoritis, perspektif kreatif merupakan paradigma yang umumnya diterapkan pada suatu kota/kawasan. Dengan perspektif kreatif ini, beberapa kota atau kawasan di dunia kemudian mendapatkan label “kota kreatif”, “kelas kreatif”, dan “kawasan kreatif”. Untuk konteks kota, label tersebut bahkan telah menjadi identitas tersendiri secara komparatif yang kemudian dibuat dalam suatu indeks kota kreatif. Dengan perspektif kreatif ini, sistem sosial pesantren diletakkan sebagai upaya-upaya internal lembaga dalam

mempertahankan eksistensinya, mengelola dinamika internal, serta menghadapi tantangan eksternal.

Lalu, bagaimanakah jika perspektif sistem sosial kreatif ini digunakan untuk menelaah sistem sosial dan struktural pesantren saat ini? Kita perlu bersama-sama menelitinya.

TANTAN HERMANSAH

Dosen Sosiologi dan CSO pada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM)-LP2M UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessen, Martin van. 1995. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung, Mizan.
- Fauroni, Lukman. _____. *Model Bisnis Berbasis Ukhuwah: Studi Entitas Bisnis Pesantren Al-ttifaq Kabupaten Bandung*. Paper.
- Geertz, C. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society: Outline The Theory of Structuration*. California: University of California Press.
- Hermansah, Tantan. 2014. *Kebertahanan dan Perubahan Sosial Komunitas Ekonomi Kreatif di Bandung*. Disertasi. Program Pascasarjana Sosiologi. Universitas Indonesia.
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Jati, Wasisto R. _____. *Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdlatul Ulama*. Artikel diunduh dari [https://www.academia.edu/2149949/Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdlatul Ulama](https://www.academia.edu/2149949/Ulama_dan_Pesantren_dalam_Dinamika_Politik_dan_Kultur_Nahdlatul_Ulama)
- Kartodirjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya
- _____. 1986. *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Analisis dan Interpretasi Data pada Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Tahun Pelajaran 2011-2012*. Laporan Dirjen Pendis
- Kurosawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol*. Jakarta: Gramedia

- Luhmann, Niklas. 1986. "The Autopoiesis of Social Systems." dalam *Sociocybernetic Paradoxes*. London: Sage
- Parson, Talcot. 1964. *The Social System: The Major Exposition of The Author's Conceptual Scheme for the Analysis of the Dynamics of the Social System*. Canada: Macmillan.
- Rimbawan, Yoyok. "Pesantren Dan Ekonomi: Kajian Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Darul Falah Bendo Munggal Krian Sidoarjo Jawa Timur." Prosiding Konferensi AICIS XII. Bandingkan dengan Mirza Maulana Al Kautsari. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pondok Pesantren. Studi Pondok pesantren Aswaja Lintang desa Sitimulyo Pinyungan Bantul*. Skripsi di UIN Sunan Kajijaga Yogyakarta.
- Sanusi, Uci. 2012. "Pendidikan Kemandirian di Pondok Pesantren." *TA'LIM Jurnal PAI* 10(2): 123-139.
- Steenbrink, Karel A. 1991. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES.
- Toriquddin, M. 2011. "Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren Berbasis Syariah." *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 3(1): 24-35.